

**Efektivitas Musrembang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud**

**Gerry Rumegang<sup>1</sup>**  
**Johanis E. Kaawoan<sup>2</sup>**  
**Ismail Sumampouw<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Dokumen Musrembang disusun secara bertingkat dari Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten, data dasar perencanaan yang diusulkan bermula dari Musrembangdes, yaitu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, diharapkan dengan hasil Musrembangdes yang berkualitas akan dihasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang baik, tetapi pada pelaksanaannya hasil Musrembangdes belum mempunyai landasan perencanaan yang baik. Pembangunan dalam pandangan masyarakat desa dikonotasikan sebagai pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan lingkungan, gorong-gorong, irigasi, sekolah, penerangan dan lain-lain. Usulan-usulan kegiatan masyarakat desa dalam Musrembangdes sebagian besar menunjukkan rencana pembangunan fisik di sekitarnya yang dianggap dibutuhkan untuk dibangun. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dan peneliti memfokuskan pada pendapat Gibson Ivancevich Donnelly, menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, yakni Produksi, Efisiensi, dan kepuasaan. Dari hasil penelitian didapati ada sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pembangunan infrastruktur desa yang merupakan hasil dari musrembang yang ada. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa pembangunan ini bukan merupakan prioritas dan kebutuhan dari masyarakat yang ada.

**Kata Kunci : Efektivitas, Musrembang, Pembangunan Infrastruktur**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan sejumlah negeri tetangga. Ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur itu tak hanya terlihat dari tertundanya proyek-proyek besar, tapi juga dapat dirasakan langsung dari kondisi jalan yang rusak, seretnya pengadaan air bersih, dan buruknya kondisi prasarana umum.

Dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan memperparah keadaan tersebut, krisis ekonomi menurunkan kemampuan penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana, terutama karena berkurangnya kemampuan pendanaan dalam memenuhi kebutuhan operasi dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana fisik yang telah ada, sehingga diperlukan penanganan yang lebih efektif serta menyeluruh di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga hasilnya akan berpengaruh besar terhadap tingkat penyediaan, kualitas pelayanan jasa serta efektivitas pengelolaan infrastruktur.

Berbagai sub-sektor infrastruktur pasca-reformasi hingga saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Infrastruktur sebenarnya merupakan kebutuhan vital untuk menunjang kegiatan ekonomi. Kemajuan ekonomi suatu negara biasanya berkorelasi dengan pembangunan infrastruktur di negara itu. Negara yang infrastrukturnya baik biasanya makin makmur.

Melihat ketertinggalan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah kemudian menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai pembangunan yang sangat mendesak saat ini. Namun, pembangunan infrastruktur itu bukannya tanpa kendala, persoalan utamanya pada masalah pendanaan pemerintah yang sangat terbatas.

Pembangunan pedesaan haruslah merupakan inner will, yaitu suatu proses emansipasi diri, inisiatif dan partisipasi kreatif masyarakat dalam pembangunan karena keberhasilan pembangunan

pedesaan adalah dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Cara yang digunakan di Indonesia dalam membangun desa, adalah ,meningkatkan desa swadaya (tradisional) menjadi desa swasembada (maju) melalui desa swakarsa (transisi), diadakan peningkatan kegiatan sosial ekonomi serta membangun prasarannya yang diperlukan, sehingga pendapatan perkapita bertambah. Indikator dalam menilai, tipologi desa tadi (swadaya, swakarsa, swasembada) adalah: alam, manusia, letak desa, mata pencaharian, produksi, adat, kelembagaan, pendidikan, swadaya, gotong royong, prasarana dan administrasi.

Program Pembangunan infrastruktur pedesaan adalah merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk desa yang ada sangat mempengaruhi usulan kegiatan infrastruktur pedesaan tersebut , bentuk- bentuk desa yang ada seperti desa memusat pegunungan, memusat fasilitas, bentuk desa linear ataupun desa tepi pantai sangat berpengaruh terhadap bentuk dan jenis kebutuhan pembangunan infrastruktur pedesaan sehingga tersedia infrastruktur lokal yang lebih memadai, dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, disamping itu manfaat lain yang dapat diperoleh adalah dalam bentuk peningkatan keterampilan (human investment) didalam penyelenggaraan prasarana lokal.

Kebutuhan pokok manusia pada umumnya dan manusia di pedesaan pada khususnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok. Pertama, meliputi kebutuhan akan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga yang dapat dinyatakan dapat memenuhi persyaratan untuk hidup. Kedua, yang meliputi kebutuhan berupa sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat dalam makna luas, seperti: air minum, kesehatan, pendidikan, sanitasi lingkungan, angkutan umum.

Belum ada ketentuan mengenai jenis infrastruktur pedesaan yang menjadi dasar usulan kegiatan, infrastruktur tersebut dapat berupa jalan poros desa, jalan desa/lingkungan/setapak, jalan usaha tani/inspeksi, jembatan gantung, prasarana air bersih, pasar tradisional, balai desa, lumbung desa, posyandu, sekolah dasar, tambatan perahu, dermaga, tempat penjemuran jala/ikan, sarana sanitasi dasar, pangkalan angkutan, pintu bagi air, pintu air, saluran tersier, talang, bendung kecil atau tanggul, dan lain lain.

Dari keterangan tersebut infrastruktur pedesaan dapat dikategorikan dalam lima kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu: jalan desa, air bersih, listrik, perumahan, irigasi. Program infrastruktur desa tertinggal yang direncanakan meliputi, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, listrik serta kebutuhan masyarakat lainnya. Sedangkan sasaran utama yang hendak dicapai yakni membuka isolasi desa guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak, kegiatan sosial ekonomi meningkat, sehingga kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi diharapkan juga turut meningkat.

Upaya untuk mengembangkan partisipasi masyarakat di era otonomi daerah, sejauh ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan. Mulai dari mengidentifikasi kesiapan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/BPD sebagai lembaga perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan, mengadakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di beberapa kelurahan untuk mengeksplorasi persepsi dan orientasi masyarakat, mengadakan pelatihan di beberapa kelurahan sebagai pilot project pengembangan mode perencanaan partisipatif, hingga merancang mekanisme Perencanaan

Pembangunan Partisipatif (PPP) dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah.

### **Konsep Efektivitas**

Kata “Efektivitas” Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2013:92) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Selain itu, Kurniawan (2014:109) mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Lebih lanjut, Hidayat dalam Rizky (2011:1) menjelaskan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.

Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai.

Gibson Ivancevich Donnelly, menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut :

1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input.
3. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat

- dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Keunggulan adalah tingkat dimana korganisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
  - Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat. (Gibson, 2011:34).

### Tinjauan Tentang Musrenbang

Musrenbang merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan. Tinjauan umum Musrenbang menjadi lebih bermakna karena menjadi media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan daerah. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat pada setiap tahapan Musrenbang, mulai dari Musrenbang Kelurahan/Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum RKPD, dan Musrenbang Daerah, serta menyepakati prioritas pembangunan dan program/kegiatan pada setiap tahapan Musrenbang.

Konsep yang digunakan untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas tersebut adalah musyawarah untuk mencapai mufakat melalui pendekatan sistem top down menuju pengelolaan bottom up, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan daerah.

Musrenbang bertujuan mencapai konsensus dan kesepakatan tentang draft final RKPD. Dokumen berisikan :

- Arah kebijakan pembangunan daerah.
- Arah program kegiatan prioritas SKPD berikut perkiraan anggarannya atau Rencana Kerja SKPD.
- Kerangka ekonomi makro dan keuangan.
- Prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD,

APBD Provinsi, dan sumber-sumber biaya lainnya.

- Rekomendasi dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.
- Alokasi anggaran untuk ADD

### Pengertian Musrenbang

Pengertian musrenbang adalah forum dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus dilakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Proses Musrenbang memajukan setiap daerah mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat.

Pengertian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang terdiri atas sebagai berikut:

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa/Kelurahan. Musrenbang tingkat Desa adalah Masyarakat Desa mulai dari Ketua RT/RW, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Pemuda, Pengrajin, dan berbagai lapisan masyarakat desa yang memiliki kebutuhan riil dapat berpartisipasi dalam melakukan kebijakan pembangunan bersama pemerintah desa.
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan. Musrenbang tingkat kecamatan adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menghimpun dan menyeleksi program pembangunan di berbagai desa yang ada di Kecamatan tersebut. Delegasi dari setiap desa dapat mengajukan program yang telah disepakati dari musyawarah pembangunan tingkat desa. Pemerintah

Kecamatan bertugas sebagai fasilitator dapat memberikan arahan yang profesional kepada setiap delegasi dari pemerintah desa dan perwakilan masyarakat desa. Program yang disepakati harus berdasarkan atas analisis yang objektif sehingga keputusan diambil sesuai dengan sasaran.

- c) Musyawarah Perencanaan Pemasangan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten. Musrenbang tingkat Kabupaten adalah musyawarah pemasangan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghimpun apa yang menjadi hasil dari Musrenbang tingkat desa dan tingkat kecamatan. Pemerintah daerah harus bisa memastikan keterwakilan yang lebih baik dari seluruh pemangku kepentingan. Dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya anggaran. Dalam hal ini pemerintah daerah harus membentuk prosedur Musrenbang dalam bentuk perda tentang partisipasi dan transparansi dalam proses penyusunan anggaran yang menekankan pada kewajiban keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang. Sehingga diharapkan substansi dari RKPD, KUA, PPA, dan sehingga menjadi APBD yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.

### Definisi Infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup social dan ekonomi (Grigg,2012:24).

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem social dan system ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur

dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya system social dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2013:93).

Infrastruktur dapat juga didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan social (kodoatie, 2015:58).

Kebutuhan pokok manusia pada umumnya dan manusia di pedesaan pada khususnya dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Pertama, meliputi kebutuhan akan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga yang dapat dinyatakan dapat memenuhi persyaratan untuk hidup. Kedua, yang meliputi kebutuhan berupa sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat dalam makna luas, seperti: air minum, kesehatan, pendidikan, sanitasi lingkungan, angkutan umum (Daldjoeni, 2013:81). Dari kedua kebutuhan tersebut harus berjalan bersama-sama tetapi diprioritaskan adalah penyediaan kebutuhan sarana prasarana sebagai dasar pemenuhan kebutuhan hidup yang lain.

Dalam pembangunan pedesaan haruslah merupakan inner will, yaitu suatu proses emansipasi diri, inisiatif dan partisipasi kreatif masyarakat dalam pembangunan karena keberhasilan pembangunan pedesaan adalah dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri (Tjokroamidjojo, 2014:72). Cara yang digunakan di Indonesia dalam membangun desa, adalah meningkatkan desa swadaya (tradisional) menjadi desa swasembada (maju) melalui desa swakarsa (transisi), diadakan peningkatan kegiatan social ekonomi serta membangun prasarananya yang diperlukan, sehingga pendapatan perkapita bertambah. Indikator dalam menilai, tipologi desa tadi (swadaya, swakarsa, swasembada) adalah: alam,

manusia, letak desa, mata pencaharian, produksi, adat, kelembagaan, pendidikan, swadaya, gotong royong, prasarana dan administrasi.

Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan adalah merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk konkretnya adalah tersedianya akses prasarana lokal yang lebih memadai, dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, disamping itu manfaat lain yang dapat diperoleh adalah dalam bentuk peningkatan ketrampilan (human investment) didalam penyelenggaraan prasarana lokal.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pendapat Gibson Ivancevich Donnelly, menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut :

1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input.
3. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat

dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Informan yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Kepala Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud.
2. Masyarakat Desa Ambia (2 Orang)
3. Badan Permusyawaratan Desa Ambia
4. Tokoh Masyarakat.
5. Tokoh Agama.
6. Tokoh Pendidikan

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. teknis analisis data meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

### Pembahasan

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka peneliti akan membahas dengan menggunakan teori Gibson Ivancevich Donnelly, menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut :

1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan. Pada indikator ini peneliti akan melihat bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam memproduksi hasil dari musrembang sehingga dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur di Desa Ambia, dalam hal sesuai dengan data yang di peroleh bahwa hasil musrembang di tahun 2019 lalu, dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa dengan rincian pembangunan yaitu rehabilitasi jalan desa dengan anggaran Rp 283.965.000,-, pembangunan sumber air bersih milik desa 35 juta dan pembangunan resapan air lapangan sepak bola dengan nilai anggaran Rp. 130.000.000,-. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa hasil dari musrembang

di desa Ambia sudah terlaksana dengan adanya pembangunan infrastruktur desa yang ada, namun ternyata hasil atau produksi dari musrembang ini belum sepenuhnya merupakan kebutuhan yang mendasar dari masyarakat yang ada. Dalam hal ini masyarakat menilai bahwa pembangunan dari hasil musrembang ini belum sesuai dengan harapan yang ada, namun masyarakat tetap mengapresiasi pemerintah desa karena sudah ada pembangunan di desa Ambia. Namun pada dasarnya masyarakat desa sendiri belum puas dengan hasil dari pembangunan ini, karena masyarakat menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang ada tidak terlalu bermanfaat bagi kepentingan umum dan dari segi kebutuhan masih belum merupakan prioritas kebutuhan dari masyarakat yang ada. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa pemerintah sudah berupaya untuk bisa menghasilkan pembangunan yang baik, namun belum di rasakan cukup oleh masyarakat yang ada, karena masyarakat menilai bahwa ini bukan merupakan hal prioritas dari masyarakat yang ada. Namun dalam kenyataannya tidak semua masyarakat yang beranggapan bahwa pembangunan infrastruktur yang ada bukan prioritas, di dapati juga ada beberapa masyarakat yang merasakan bahwa pembangunan dari hasil musrembang ini sangat membantu aktivitas dari masyarakat desa Ambia. Dalam hal ini juga ternyata di temui bahwa dalam merespon hasil dari musrembang ini tidak semua masyarakat yang terlibat, karena pada saat musrembang masyarakat tidak mengetahui proses atau alur musrembang ini sehingga ada sebagian masyarakat beranggapan bahwa pembangunan ini bukan prioritas, padahal proses pembangunan ini melewati alur yang begitu panjang dan ini berdasarkan usulan-usulan dari para peserta

musrembang yang hadir pada saat proses musrembang berlangsung.

2. Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input. Pada indikator ini peneliti akan melihat apakah musrembang di desa Ambia bisa berguna bagi kehidupan masyarakat terlebih pada proses pembangunan infrastruktur yang ada. Dalam hal ini peneliti menemukan perbandingan sebelum musrembang berlangsung dan sesudah berlangsung, tentunya proses musrembang ini membawah dampak yang baik bagi kehidupan bermasyarakat yang ada, khususnya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa yang ada. Output dari musrembang ini adalah menghasil keputusan-keputusan dari masing-masing elemen masyarakat yang ada, dan usulan ini nantinya akan dijadikan sebagai usulan dalam pelaksanaan kegiatan desa yang ada di danai lewat APBdes, APBD Kabupaten bahkan Provinsi. Dalam hal ini tentunya output dari musrembang ini membawah dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat desa Ambia, karena masyarakat bisa merasakan pembangunan infrastruktur desa, namun ternyata pembangunan yang ada, dirasakan oleh sebagian masyarakat kurang manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang tidak tahu bagaimana proses musrembang yang ada, sehingga bisa diusulkan dan disahkan untuk dapat diproses sebagai salah satu pembangunan infrastruktur desa yang ada. Proses pelaksanaan musrembang selama ini di damping oleh tim pendamping desa, Kecamatan dan juga pendamping lokal desa, dan proses musrembang juga biasanya di lakukan pada bulan Januari, dalam hal ini pemerintah Kecamatan mengirim surat ke pemerintah desa untuk jadwal musrembang, dan proses musrembang tersebut juga sudah di tentukan oleh Pemerintah Kecamatan yang ada. Jadi ketika terjadwal di Desa Ambia, maka seluruh tim pendamping

mulai dari desa, kelurahan, dan juga lokal desa akan berkoordinasi dan melaksanakan musrembang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Musrembang desa, BPD mengundang perwakilan unsur-unsur desa untuk menghadiri musrembang, misalnya tokoh agama, tokoh pendidikan, dan juga ada perwakilan petani, nelayan, perwakilan perempuan, keluarga miskin, LPM, dan juga ketua tim penggerak PKK, jadi semua unsur dan elemen masyarakat di libatkan dalam proses musrembang berlangsung, dan hal ini untuk menjadi perwakilan masyarakat. Jadi proses pelaksanaan proses musrembang di pimpin oleh Ketua BPD, dan juga yang menyampaikan materi dari pihak Kecamatan Essang Selatan yang ada. Lalu perwakilan dari tim pendamping menyampaikan materi, setelah itu yang terakhir menyampaikan materi adalah kepala desa Ambia. Yang menjadi pokok pelaksanaan musrembang adalah pengusulan kegiatan yang akan di danai oleh dana desa, APBD Kabupaten, Provinsi, dan tiap usulan yang masuk di pisahkan, makanya masing-masing perwakilan masyarakat mengusulkan mana pembangunan yang menjadi prioritas akan di berikan kode pada table yang telah di siapkan oleh pemerintah desa Ambia, makanya tiap usulan dari masyarakat akan di berikan tanda, mana yang akan di tanggung oleh dana APBD desa, APBD Kabupaten, dan APBD Provinsi. Maka setiap usulan yang masuk dari setiap elemen masyarakat yang akan di kaji oleh setiap peserta musrembang, dan akan diputuskan mana yang akan menjadi diprioritaskan untuk di danai, karena biasanya pelaksanaan musrembang, makanya setiap pelaksanaan musrembang kami akan melihat usulan mana yang belum di laksanakan pada tahun sebelumnya maka prioritas pendanaan yaitu usulan tahun sebelumnya yang sudah di susun draf nya oleh pihak pemerintah desa atau pegawai desa yang ada.

Jadi pemerintah desa ada tim penyusun perencanaan yang nantinya ini akan keluar pada rencana kerja pemerintah desa, setelah itu daftar usulan yang telah dirangkum yang akan di danai oleh anggaran APBdes, APBD Kabupaten, dan APBD Provinsi telah di buat draf yang isinya mengenai pembangunan apa saja yang akan di danai oleh masing-masing anggaran yang ada.

3. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada indicator ini peneliti akan membahas mengenai kepuasan dari masyarakat terkait pembangunan infrastruktur yang merupakan hasil dari musrembang yang ada di desa Ambia. Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pembangunan infrastruktur desa yang merupakan hasil dari musrembang yang ada. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa pembangunan ini bukan merupakan prioritas dan kebutuhan dari masyarakat yang ada, namun ada juga masyarakat yang merasa terbantu dengan pembangunan infrastruktur yang merupakan hasil dari musrembang yang ada. Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa sebagian besar masyarakat yang tidak merasa puas dengan hasil pembangunan dari musrembang yang ada, karena mereka tidak mengetahui proses dan alur musrembang ini sampai bisa setuju untuk bisa melaksanakan proses pembangunan yang ada, karena mengingat juga anggaran yang ada tidak dapat memadai jika harus melaksanakan semua kebutuhan dari masyarakat untuk bisa melaksanakan pembangunan yang ada. Proses pelaksanaan musrembang selama ini di damping oleh tim pendamping desa, Kecamatan dan juga pendamping lokal desa, dan proses musrembang juga biasanya di lakukan pada bulan Januari, dalam hal ini pemerintah Kecamatan mengirim surat ke

pemerintah desa untuk jadwal musrembang, dan proses musrembang tersebut juga sudah di tentukan oleh Pemerintah Kecamatan yang ada. Jadi ketika terjadwal di Desa Ambia, maka seluruh tim pendamping mulai dari desa, kelurahan, dan juga lokal desa akan berkoordinasi dan melaksanakan musrembang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Musrembang desa, BPD mengundang perwakilan unsur-unsur desa untuk menghadiri musrembang, misalnya tokoh agama, tokoh pendidikan, dan juga ada perwakilan petani, nelayan, perwakilan perempuan, keluarga miskin, LPM, dan juga ketua tim penggerak PKK, jadi semua unsur dan elemen masyarakat di libatkan dalam proses musrembang berlangsung, dan hal ini untuk menjadi perwakilan masyarakat. Jadi proses pelaksanaan proses musrembang di pimpin oleh Ketua BPD, dan juga yang menyampaikan materi dari pihak Kecamatan Essang Selatan yang ada. Lalu perwakilan dari tim pendamping menyampaikan materi, setelah itu yang terakhir menyampaikan materi adalah kepala desa Ambia. Yang menjadi pokok pelaksanaan musrembang adalah pengusulan kegiatan yang akan di danai oleh dana desa, APBD Kabupaten, Provinsi, dan tiap usulan yang masuk di pisahkan, makanya masing-masing perwakilan masyarakat mengusulkan mana pembangunan yang menjadi prioritas akan di berikan kode pada table yang telah di siapkan oleh pemerintah desa Ambia, makanya tiap usulan dari masyarakat akan di berikan tanda, mana yang akan di tanggung oleh dana APBD desa, APBD Kabupaten, dan APBD Provinsi. Maka setiap usulan yang masuk dari setiap elemen masyarakat yang akan di kaji oleh setiap peserta musrembang, dan akan diputuskan mana yang akan menjadi prioritas untuk di danai, karena biasanya pelaksanaan musrembang, makanya setiap pelaksanaan musrembang kami akan melihat

usulan mana yang belum di laksanakan pada tahun sebelumnya maka prioritas pendanaan yaitu usulan tahun sebelumnya yang sudah di susun draf nya oleh pihak pemerintah desa atau pegawai desa yang ada. Jadi pemerintah desa ada tim penyusun perencanaan yang nantinya ini akan keluar pada rencana kerja pemerintah desa, setelah itu daftar usulan yang telah dirangkum yang akan di danai oleh anggaran APBdes, APBD Kabupaten, dan APBD Provinsi telah di buat draf yang isinya mengenai pembangunan apa saja yang akan di danai oleh masing-masing anggaran yang ada

### **Kesimpulan**

Pemerintah desa dalam memproduksi hasil dari musrembang sehingga dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur di Desa Ambia, dalam hal sesuai dengan data yang di peroleh bahwa hasil musrembang di tahun 2019 lalu, dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa dengan rincian pembangunan yaitu rehabilitasi jalan desa dengan anggaran Rp 283.965.000,-, pembangunan sumber air bersih milik desa 35 juta dan pembangunan resapan air lapangan sepak bola dengan nilai anggaran Rp. 130.000.000,-. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa hasil dari musrembang di desa Ambia sudah terlaksana dengan adanya pembangunan infrastruktur desa yang ada, namun ternyata hasil atau produksi dari musrembang ini belum sepenuhnya merupakan kebutuhan yang mendasar dari masyarakat yang ada.

Dalam hal ini tentunya output dari musrembang ini membawah dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat desa Ambia, karena masyarakat bisa merasakan pembangunan infrastruktur desa, namun ternyata pembangunan yang ada, dirasakan oleh sebagian masyarakat kurang manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang tidak tahu bagaimana proses musrembang yang ada, sehingga bisa diusulkan dan

disahkan untuk dapat diproses sebagai salah satu pembangunan infrastruktur desa yang ada.

Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pembangunan infrastruktur desa yang merupakan hasil dari musrembang yang ada. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa pembangunan ini bukan merupakan prioritas dan kebutuhan dari masyarakat yang ada, namun ada juga masyarakat yang merasa terbantu dengan pembangunan infrastruktur yang merupakan hasil dari musrembang yang ada

#### **Saran**

Dalam hal ini pemerintah desa seharusnya lebih memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan, karena didapati dilapangan bahwa sebagian masyarakat merasa bahwa pembangunan infrastruktur dari hasil musrembang bukan merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Disarankan juga untuk pemerintah agar lebih berperan aktif lagi dalam memanggil peserta musrembang, karena dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan musrembang, sehingga masyarakat menganggap bahwa pembangunan yang merupakan hasil musrembang kurang manfaatnya bagi kehidupan masyarakat desa Ambia

#### **Daftar Pustaka**

Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1983.

Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.

Daldjoeni, N. 1998. Geografi Kota dan Desa. Bandung : Penerbit Alumni ITB.

Friedman, Lawrence M. 1986. Dilemas of Law in the Welfare State. Dalam Gunther Teubner (Penyunting), —Legal Culture and Welfare Statell,

Selected Reading, hlm 13-27. New York: Walter de Gruyter.

Grigg, N. Dan Fontane, D. G. 2000, Infrastructure System Management & Optimazation Internasional Civil Engineering Departement Diponegoro University

Gibson, James., L., Jhon M., Ivancevich., dan H., Donnelly., Jr. 2008: Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, dan proses, terjemahan oleh Joerban Wahid, Erlangga, Jakarta.

Hidayat. 2011. Definisi Efektivitas, Bandung : Angkasa.

Kartasasmita, G. 1997. Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat, Bappenas, Jakarta.

Kurniawan, agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.

Kodoatie, R.J. (2003), Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Lubis, S.M. Hari & Huseini, Martani. 1987. Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.

Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Nawawi , Hadari dan M. Martini Hadari, Kepemimpinan yang Efektif, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2006.

Steers, Richard M, Terj: Magdalena Jamin, 1980. Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga.

S.P. Siagian. 1978. Manajemen, Yogyakarta: Liberty.

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. Manajemen Publik. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.

**Sumber – sumber lainnya :**

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Desa.

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Dan Menteri Dalam Negeri No. 0259/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MUSRENBANG 2005.